

ABSTRAK

DPR RI pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang mensosialisasikan UU TPKS melalui *website* resminya. Namun, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentase angka kekerasan diskriminasi seksual terhadap perempuan meningkat baik dikalangan remaja sampai kepada kalangan dewasa. *Website* DPR RI berdasarkan hasil Baseline Survey Peta Jalan *Open Parliament Indonesia (OPI)* pada tahun 2020 dinilai masih terdapat informasi yang kurang *up to date*, meliputi 40% menyatakan buruk dan 9,2% menyatakan sangat buruk. Buruknya kualitas informasi *website* DPR RI pada laman UU TPKS yang dinyatakan kurang *up to date* menimbulkan ketidakjelasan informasi UU TPKS pada laman resmi DPR RI yaitu situs *websitenya* dalam mensosialisasikan informasi mengenai UU TPKS. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengacu teori *new media* oleh Walter J. Ong (1982) dengan lima sub-analisis: Interaktivitas, Kemampuan Dialog, Simultaneitas, Partisipasi Komunal dan Digitalisasi Informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, *website* dpr.go.id telah berhasil menerapkan 4 dari 5 sub analisis. Dalam interaktivitas dpr.go.id telah mengadopsi konsep komunikasi dua arah pada proses legislasi. Dalam simultanitas dpr.go.id memiliki kemampuan *search engine* yang memungkinkan pengguna untuk berpindah antara berbagai jenis konten dengan cepat. Dalam partisipasi komunal dpr.go.id sudah terdapat fitur yang mendukung partisipasi publik untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan DPR RI. Dalam strategi digitalisasi informasi, dpr.go.id memberi akses terbuka terhadap informasi dengan *up to date* yang dikemas secara *user friendly*. Sementara itu, *website* dpr.go.id belum menerapkan kemampuan dialog karena kurangnya respons terhadap komentar masyarakat dan belum adanya forum diskusi tematik. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman tentang pembentukan opini publik terhadap UU TPKS dalam pengelolaan *website* dpr.go.id

Kata Kunci: DPR RI, *New Media*, Pengelolaan Website, UU TPKS, *Website*.